

Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pemerataan Bantuan Sosial Pangan Kepada Masyarakat di Desa Salamwates Kabupaten Trenggalek

Clareza Arum Anugeraheni¹ Lukman Arif²

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, UPN "Veteran" Jawa Timur^{1,2},

Email: clarezaarum2615@gmail.com¹ lukman_arif.adneg@upnjatim.ac.id²

Abstract

The government has an important role in distributing resources and providing services to the community. Local government also participated in this matter. Based on the principle of regional autonomy, the government is given the freedom to regulate and manage government affairs in order to maximize its performance. This study aims to find out and analyze the performance of the Social Service in the distribution of the 2022 Food Social Assistance (BSP) to the community in Salamwates Village, Trenggalek Regency. The type of research used in this study is descriptive with a qualitative approach. The research focus used in this research is productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. Sources of data obtained by researchers in conducting this research are key informants, observations, and documentation. The data analysis method used in this study is the method developed by Miles and Huberman. As well as the validity of the data used, namely the degree of trust (credibility), transferability (transferability), dependability (dependability), and certainty (confirmability). The results of this study found that productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability had been carried out well even though there were some things that seemed sudden

Keywords: *BSP, Performance, Distribution Equity,*



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki peran penting dalam pendistribusian sumber daya dan memberikan pelayanan pada masyarakat, misalnya dalam mendorong pembangunan dan menyukseskan infrastruktur daerah. Pemerintah daerah turut ikut serta dalam hal tersebut. Berdasarkan asas otonomi daerah, pemerintah diberi kebebasan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintah untuk memaksimalkan kinerjanya. Adanya otonomi daerah, kebijakan yang dibuat pemerintah menjadi berkualitas dan lebih mudah. Pemerintah harus mampu mengelola dan menyalurkan anggaran daerah dengan baik di mana program yang dibuat harus berjalan dengan efektif, efisien dan lebih cepat (Efendi & Freddy, 2017). Pemerintah memerlukan suatu sistem penilaian dalam melaksanakan programnya guna mencapai sasaran yang dilaksanakan berdasarkan tujuan organisasi dengan cara melakukan pengukuran kinerja di mana dalam melakukannya harus dengan pertimbangan berbagai aspek, agar aspek dapat berjalan dengan efektif dalam organisasi tersebut. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya (Huti, 2020). Terkait dengan teori kinerja di atas, Rummler & Brache mengemukakan bahwa terdapat tiga aspek dalam kinerja, yaitu kinerja organisasi, kinerja proses, dan kinerja individu/ pekerjaan (Ajabar, 2020).

Bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah adalah pelayanan masyarakat dalam menyalurkan kebijakan-kebijakan atau program-program pemerintah, salah satunya adalah Bantuan Sosial Pangan (BSP). BSP disalurkan kepada keluarga miskin dan tidak diberikan dalam bentuk tunai, melainkan berupa bahan pangan dan harus memenuhi kriteria

memenuhi gizi seperti karbohidrat, protein, mineral, ataupun vitamin (BPS, 2020). Di Indonesia Coronavirus Disease 2019 muncul sejak awal tahun 2020 yang membawa dampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama di aspek sosial dan ekonomi bagi masyarakat (Sari, 2020). Persentase penduduk miskin di Indonesia sejak bulan Desember 2020 meningkat sebanyak 0,37% bila dibandingkan dengan bulan Desember 2019. Selain itu pula, pada Triwulan II tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sedang mengalami kontraksi yaitu sebesar 5,32% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II di tahun 2019 (Menteri Sosial, 2020). Padahal persentase jumlah kemiskinan di Indonesia pada September 2015 sampai dengan Desember 2020 secara berturut-turut sudah mengalami penurunan. Dengan adanya kondisi tersebut yang mendorong pemerintah agar memberikan dan menjalankan berbagai kebijakan atau program dalam rangka memberikan jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat (Katharina, 2020). JPS adalah suatu cara yang digunakan pemerintah dengan maksud untuk mengurangi dampak sosial dari akibat adanya suatu krisis (Muthiah, 2021).

Berkaitan dengan kinerja Dinas Sosial di Kabupaten Trenggalek dalam pemerataan penyaluran Program Sembako kepada masyarakat di Desa Salamwates, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, masih terdapat keluhan-keluhan masyarakat terkait proses penyaluran dana bantuan sosial pangan tersebut. Mengutip dari berita yang dimuat dalam media online kabartrenggalek.com Syah Muhammad Natanegara mengakui bansos yang disalurkan kepada warga tidak merata dan tepat sasaran karena persoalan pendataan warga penerima bansos. Syah mengungkapkan data warga penerima bansos yang sudah diusulkan dari pemerintah desa ke pemerintah pusat tidak terpakai. Hal itu dikarenakan data dari pemerintahan pusat berisi data lama yang di dalamnya masih ada data warga yang mampu ataupun warga yang sudah meninggal. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Trenggalek untuk mengevaluasi layanan bansos yang sudah berjalan. Pemkab Trenggalek perlu mengupayakan supaya masyarakat mendapatkan bansos sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Tidak hanya itu, Ciptadesa.com mencatat, mulai Agustus - 13 Desember 2021, total jumlah pengaduan perlindungan sosial sebanyak 295 pengaduan. Jumlah pengaduan perlindungan sosial tersebut merupakan keseluruhan dari pengaduan yang masuk ciptadesa.com di tingkat nasional. Artinya, pengaduan di ciptadesa.com tentang masalah bansos 2022 didominasi oleh warga Trenggalek. Kemudian Salah satu warga Desa Salamwates Kabupaten Trenggalek yang melaporkan layanan bansos itu adalah Alfina. Alfina menceritakan, ia pernah mendapatkan bansos dari program Bupati Trenggalek, yaitu Kartu Penyangga Ekonomi (KPE). Namun, Alfina hanya mendapatkan bantuan dari KPE selama lima bulan saja, dari Agustus sampai Desember 2020. Setelah bantuan KPE itu berhenti, Alfina mengalami beberapa kesulitan seperti memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, biaya listrik serta biaya sekolah anak-anaknya.

Kemiskinan Trenggalek adalah 10,98%, artinya dari 35,3% masyarakat berpenghasilan paling rendah se-Indonesia yang berada di Kabupaten Trenggalek terdapat 29.546 KK Miskin. Selama ini sejumlah 54.000 KK telah mendapatkan BSP. Menyikapi masa pandemi Corona, pemerintah pusat mengambil kebijakan dengan menambah kuota penerima BSP dari 54 ribu di Kabupaten Trenggalek menjadi 78.671 KK. Sehingga, terdapat 16.425 KK yang belum mendapatkan BSP yang ada dalam DTKS (Hartono, 2022). Dari pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembagian BSP 2022 belum dianggap merata. Hal ini dikarenakan pendataan yang berbeda atau persepsi yang berbeda terkait warga miskin yang layak diberikan bantuan. Selain itu juga banyaknya jumlah penerima bantuan dan tidak mungkin

bisa 100% benar. Akhirnya bantuan tersebut malah dinikmati segelintir orang yang tidak termasuk target penerima manfaat karena banyaknya jumlah penerima manfaat.

Masyarakat meminta pemerintah selayaknya lebih proaktif dalam bekerja dan tidak membuat masyarakat semakin marah mengenai persoalan tidak validnya data sebagaimana data yang diserahkan kepada desa dan kelurahan sangat berbeda dengan data dari Dinas Sosial sehingga menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat bahwa data tersebut tidak diperbaharui apabila Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek berpatokan pada data yang notabene merupakan hasil rekap pada tahun 2017.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis kinerja Dinas Sosial dalam pemerataan penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) 2022 kepada masyarakat di Desa Salamwates Kabupaten Trenggalek.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penulis sendiri memilih tempat penelitian yang bertempat di Kabupaten Trenggalek, maka dari itu lokasi penelitian ini berada di Desa Salamwates Kabupaten Trenggalek. Fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakannya selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain Moleong (2018). Adapun sumber data yang diperoleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yakni informan kunci, observasi, dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukan pada suatu yang abstrak, tidak dapat di wujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya. Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode observasi, wawancara/interview, dan dokumentasi. Kemudian Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang di kembangkan oleh Miles dan Huberman bahwa di dalam analisa data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Serta keabsahan data yang digunakan yakni derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) (Sugiyono, 2017).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdapat berbagai latar belakang yang menyebabkan masyarakat disetiap daerah tidak memiliki kemampuan dan jaringan untuk meningkatkan pendapatan, yang berakibat pada dikategorikannya masyarakat miskin. Sepanjang 2 tahun kebelakang dari 2020-2022, masyarakat dihadapkan dengan wabah covid 19 yang sangat berdampak pada penurunan pendapatan disektor ekonomi, hal ini juga menyebabkan masyarakat sulit untuk berkembang dan menambah populasi masyarakat miskin.

Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek, menanggapi hal tersebut dengan melakukan berbagai upaya salah satunya ialah pemberian bantuan berupa bahan pokok dan juga uang untuk digunakan masyarakat miskin yang terdata dalam DTKS. Program penyaluran BSP ini juga menjadi tolak ukur seberapa jauh kinerja Dinas Sosial dalam membantu mengentaskan kemiskinan, salah satunya di desa Salamwates Kecamatan Dongko yang juga memiliki masalah terkait masyarakat miskin yang memerlukan bantuan.

Kinerja tidak lepas dari pengukuran berdasarkan standar kinerja yang dijadikan sebagai tolak ukur organisasi agar dapat mengukur sejauh mana kinerja yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu dalam mengukur kinerja suatu organisasi diperlukan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi sehingga dapat dijadikan pembandingan dalam memperbaiki kinerja organisasi. Berdasarkan hal ini peneliti merasa bahwa kinerja Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dalam menyalurkan BSP di desa Salamwates Kecamatan Dongko ini terdapat kesesuaian dengan teori yang disampaikan menurut Rahajeng (2018), bahwa kinerja organisasi publik dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

Produktivitas

Dalam sebuah konsep produktivitas tidak hanya berhubungan pada efisiensi, namun terdapat efektivitas di dalam mengukurnya. Sehingga produktivitas dapat diartikan secara luas sebagai perbandingan antara input dan output. Hal ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dengan memantau dan memonitoring masyarakat miskin, memfasilitasi dan memperbaiki data secara periodik untuk menghindari penyaluran BSP yang tidak tepat sasaran, yaitu seberapa besar BSP yang disalurkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti bahas sebelumnya, bisa dikatakan bahwa produktivitas Dinas Sosial dalam penyaluran dan pemerataan BSP sudah dilakukan dengan baik. Penyaluran bantuan sosial pangan diberikan kepada masyarakat yang telah terdata di DTKS menyesuaikan syarat dan ketentuan. Sebelum melaksanakan penyaluran BSP, Dinas Sosial terlebih dahulu mengecek pendataan berdasarkan syarat dan ketentuan agar jika terjadi ketidak validan data kemudian bisa diajukan kembali ke pusat yaitu kemensos agar diproses dan diperbarui. Kemudian Dinas Sosial berkoordinasi dengan pekerja sosial ditingkat kecamatan yaitu TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) untuk membantu dalam validasi data dan juga penyaluran BSP karena mereka yang lebih dekat dan tau kondisi masyarakat miskin di daerahnya.

Program BSP yang diberikan kepada masyarakat berupa bahan pokok, seperti beras, telur, gula, minyak, teh dll ditambah uang Rp. 200.000 per bulan selama tiga bulan pada bulan Juli, September, Desember setiap tahun. Pendataan kembali yang dilakukan oleh Dinas Sosial secara periodik merupakan upaya agar penyaluran BSP bisa sesuai dengan jumlah kongkrit keluarga penerima manfaat yang terdata dalam DTKS, guna menghindari ketidakvalidan kriteria penerima yang masuk dan terdata, juga supaya tepat sasaran dan diterima dengan penerima yang seharusnya mendapatkan BSP sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang diberlakukan oleh Kemensos.

Kualitas Layanan

Sebagai pelayan masyarakat tentunya juga memiliki tugas dalam memberikan pelayanan semaksimal mungkin guna menjawab kebutuhan dari masyarakat, mulai dari proses pembuatan kebijakan atau program sampai pasca pelaksanaan harus dijalankan dengan baik. Keseriusan ini lah yang dapat mengukur sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik maupun pemerintah sebagai pejabat yang dipilih rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti bahas sebelumnya menunjukkan tingkat keseriusan Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dalam memberikan kualitas pelayanan dengan baik, Bisa peneliti simpulkan bahwa pelayanan yang diberikan Dinas sosial dalam penyaluran BSP kepada masyarakat miskin di desa Salamwates Kecamatan Dongko ini sudah dijalankan dengan baik, hal ini bisa diketahui dari bagaimana Data penerima BSP yang

diberikan oleh Kemensos sebelum kemudian disalurkan maka dilakukan cek terlebih dahulu guna menghindari kesalahan, terjadinya data yang double dan penerima yang tidak sesuai kriteria.

Dinas Sosial berkoordinasi dengan pekerja sosial kecamatan yaitu TKSK untuk mensinkronkan data dari kemensos dengan data masyarakat miskin di daerahnya. Kemudian jika terjadi kesalahan dan penambahan maka Dinas Sosial mengajukan kembali ke Kemensos untuk ditinjau ulang, walaupun terkadang tidak langsung diproses dan tidak bisa masuk semuanya entah memang tidak memenuhi kriteria ataupun ada data yang double. Hal ini juga menjadi problem ketika penyaluran BSP dilakukan yang akhirnya entah kurang fahamnya masyarakat miskin terkait alur dan persyaratan penerima atau memang kurangnya pemberitahuan dari Dinas sosial dan TKSK. Namun setidaknya Dinas Sosial telah mengupayakan yang terbaik walaupun memang dalam pengajuan data terbaru belum bisa langsung terdata di DTKS.

Setelah data valid, penyaluran BSP dilakukan bekerjasama dengan Pos Indonesia dimasing-masing kelurahan atau juga bisa di pusat pemerintahan yaitu kelurahan atau kecamatan

Responsivitas

Indikator keberhasilan kinerja organisasi publik menurut Rahajeng yang selanjutnya ialah bagaimana responsivitas dari organisasi tersebut bisa segera dilakukan dengan menanggapi dan memberikan solusi terkait permasalahan, kendala dalam pelaksanaan program. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek telah merespon dengan baik berbagai problem dalam pelaksanaan penyaluran program BSP kepada masyarakat miskin yang terdata di DTKS.

Terlihat dari kesigapan pembaruan data yang dilakukan setelah mendapat data dari pusat.. Hal ini dilakukan untuk mengecek kembali serta berkoordinasi dengan TKSK untuk mendata masyarakat miskin yang memenuhi kriteria namun belum terdata sehingga bisa meminimalisir ketidak tepat sasaran BSP.

Selanjutnya ialah bagaimana responsivitas Dinas Sosial ketika penerima BSP atau keluarga penerima manfaat ini memiliki keresahan terkait bansos?. Dinas Sosial melalui TKSK menyampaikan kepada masyarakat miskin di daerahnya ketika ada kesalahan ataupun ingin menyampaikan aspirasi bisa mengakses aplikasi cek bansos dimana masyarakat dapat menyampaikan usulan dan sanggahan nya melalui fitur aplikasi tersebut agar dengan cepat di perbaiki oleh Dinas Sosial. Selain itu jika terdapat masyarakat yang tidak bisa menggunakan gadget dan aplikasi cek bansos, TKSK dan pemerintah daerah juga menyediakan buku pengaduan yang bisa menjadi solusi atas keterbatasan tersebut.

Kedua opsi pengaduan tersebut dilakukan untuk memudahkan Dinas Sosial dalam mendata berbagai pengaduan terkait bantuan sosial dan juga memaksimalkan pelaksanaan dalam pemerataan BSP kepada masyarakat miskin.

Responsibilitas

Dinas Sosial juga memiliki responbilitas dalam memastikan penyaluran BSP diberikan secara merata, hal yang dilakukan ialah menggandeng Pos Indonesia dalam menyalurkan bantuan dibantu TKSK dan pejabat terkait yang bertanggungjawab dalam pemerataan BSP.

Dalam pelaksanaan penyaluran BSP, Dinas Sosial hanya sebagai pengawas dan memantau mekanisme agar berjalan dengan baik dan tersalurkan secara merata. Hal ini dilakukan dengan memperbaiki data yang diberikan oleh kemensos, dikarenakan alur

penyaluran BSP dimulai dari data KPM (keluarga penerima manfaat) yang diberikan oleh kemensos kepada Dinas sosial. Namun terkadang data yang diberikan kemensos terkesan mendadak yang akhirnya berakibat pada kurangnya sosialisasi terkait pembayaran data bagi masyarakat yang memang layak namun belum terdata di DTKS.

Berdasarkan hal itu, Dinas Sosial tetap mengupayakan agar penerima BSP bisa mendapatkan bantuan dengan merata, dengan mengajukan data terbaru kepada kemensos untuk diperbarui. Ini juga merupakan langkah kongrit sebagai tanggungjawab Dinas Sosial dalam membantu meringankan beban masyarakat miskin yang juga terdampak akibat pandemi.

Akuntabilitas

Mengacu pada norma dan aturan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini kemensos, maka terdapat beberapa kriteria penerima manfaat yang harus terpenuhi diantaranya KPM harus dari keluarga miskin, tidak terdata dalam program bantuan yang lain seperti PKH, terdampak covid 19 dan harus terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), setidaknya itulah pont penting kriteria penerima manfaat.

Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek memiliki akuntabilitas yang perlu dijaga dan dijalankan sesuai dengan norma dan aturan kebijakan seperti yang telah peneliti bahas diparagraf pertama. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial telah mengupayakan penyaluran BSP dengan baik walaupun memang belum bisa dikatakan merata dikarenakan kendala yang terjadi seperti belum validnya data dari kemensos. Hal ini ditanggapi dengan sesegera mungkin oleh Dinas Sosial dengan mengolah dan mengecek kembali data dari pusat, kemudian melakukan perbaikan dan perubahan secara bertahap berdasarkan data yang termasuk dalam DTKS dan kriteria yang lainnya.

Namun disisi lain pernah terjadi kenakalan oknum tertentu yang mengarahkan penerima manfaat untuk membelanjakan uangnya ke warung tertentu dengan sekali habis, padahal tidak ada himbauan seperti dan malahan Dinas Sosial membebaskan bagi penerima untuk beli dimana saja dengan tetap menyertakan nota pembelian kemudian menyerahkan ke TKSK yang akan diserahkan ke Dinas Sosial.

Secara garis besar akuntabilitas Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dalam menyalurkan BSP yang berupa sembako dan uang tunai sebesar 200rb setiap tiga bulan dalam setahun sudah dilakukan dengan maksimal dengan selalu memvalidasi data terlebih dahulu dari kemensos sebelum akhirnya menyalurkannya ke penerima manfaat atau masyarakat miskin. Terjadinya kendala seperti ulah oknum diatas memang menjadi perhatian besar agar tidak terjadi lagi dengan terus memonitoring dengan datang ke tempat penyaluran dan mengawal langsung dibantu oleh kecamatan dan pihak yang telah diajak kerjasama seperti Pos Indonesia atau lembaga masyarakat yang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti sampaikan pada bab sebelumnya, maka bisa dilihat bahwa Kinerja Dinas Sosial dalam pemerataan BSP di desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek terbagi kedalam beberapa indikator diantaranya Produktivitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek dalam pemerataan BSP di desa Salamwates Kecamatan Dongko diberikan kepada masyarakat miskin yang terdata dalam DTKS. Kemudian Kinerja Dinas Sosial juga terlihat dari kualitas layanan yang diberikan yaitu dengan menindaklanjuti data yang diperoleh dari pusat dan memperbaiki dengan datapenerima manfaat yang memenuhi kriteria namun belum terdata, kemudian diajukan ke kemensos untuk diperbarui walaupun memang tidak bisa langsung masuk semuanya tetapi

setidaknya Dinas Sosial sudah berupaya dengan baik. Selanjutnya Responsivitas Dinas Sosial terlihat dari bagaimana menanggapi berbagai masalah dan aspirasi, jika terkait data kemudian langsung diperbaiki secara bertahap, maka dalam penyampaian aspirasi masyarakat, Dinas Sosial dibantu TKSK mengarahkan masyarakat miskin untuk menyampaikan saran, kritik, dan aspirasinya lewat aplikasi cek bansos. Kemudian Tanggungjawab Dinas Sosial dalam penyaluran BSP hanya sebagai pengawas dan memantau mekanisme agar berjalan dengan baik dan tersalurkan secara merata. Hal ini dilakukan dengan memperbaiki data yang diberikan oleh kemensos, dikarenakan alur penyaluran BSP dimulai dari data KPM (keluarga penerima manfaat) yang diberikan oleh kemensos kepada Dinas sosial. Namun terkadang data yang diberikan kemensos terkesan mendadak. Dan yang terakhir yakni Pada point akuntabilitas Dinas Sosial Kabupaten trenggalek belum bisa dikatakan terlaksana dengan baik dikarenakan adanya data yang belum valid terkait penerima yang layak namun belum terdata, tetapi hal ini terus diperbaiki oleh Dinas Sosial. Selain itu terjadinya ulah oknum terkait penerima BSP yang diarahkan ke warung tertentu untuk belanja tetap menjadi evaluasi bersama guna tidak terjadi kembali di kemudian hari.

Berdasarkan seluruh pembahasan dari temuan lapangan, maka peneliti ingin menyampaikan beberapa saran diantaranya yakni Terkait pembaruan data agar terus dilakukan dikarenakan masyarakat miskin yang mungkin bertambah atau belum terdata, Melakukan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat miskin terkait syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar mendapat BSP dan bisa merata, Memantau, mengawasi dan menindak pergerakan oknum-oknum tertentu yang mungkin melakukan kenakalan dalam proses penyaluran BSP, serta Memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat miskin agar kedepannya tidak mengandalkan bantuan sosial yang bisa saja menimbulkan ketergantungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajabar. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Ana, R. H. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai. *Public Administration Journal*, 2(2): 13-20. <http://paj.upnjatim.ac.id/index.php/paj/article/view/13>
- Astrama, M. (2021). Perilaku Kerja Inovatif, Budaya Organisasi, dan Kinerja Karyawan: Konsep dan Aplikasi dalam Penelitian. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Ave, T. S. (2020). Peran Dinas Sosial Kabupaten Sintang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Pkh) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Hara. *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, 1(1): 34-45.
- Hasibuan, B. P. (2022). Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Menyalurkan Bantuan Sosial covid-19 Kepada Masyarakat Di Kota Medan Tahun 2020. *Jurnal Governance Opinion*, 7(1): 90-103. <file:///C:/Users/user/Downloads/1526-145-3571-1-10-20220530.pdf>
- Efendi, A & Freddy, P. (2017). Hukum Administrasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatimah, F. N. D. (2021). Panduan Praktis Evaluasi Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Halomoan, Y. K. (2021). Pengaruh Kompensasi, dan Lingkungan kerja terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Indriya Lifeart Development di Jakarta. *Jurnal Perkusi*. 1(1): 24-34. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIPER/article/view/11043>

- Hartono, K. L. (2022). Bupati Trenggalek Jelaskan Mekanisme Dan Penerima Bantuan Sosial Dari Pemerintah Di Masa Pandemi COVID-19. <https://www.trenggalekkab.go.id/article/berita/bupati-trenggalek-jelaskan-mekanisme-dan-penerima-bantuan-sosial-dari-pemerintah-di-masa-pandemi-covid-19>
- Hermadik. (2020). Kinerja organisasi Kecamatan Satui menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Skripsi, Universitas Negeri Antasari Banjarmasin). <https://idr.uin-antasari.ac.id/13897/2/AWAL.pdf>
- Hery. 2019. Manajemen Kinerja. Jakarta: PT Grasindo.
- Huti, H. J. (2020). Analisis kinerja pegawai pada bidang umum dan pegawai pada kantor dinas kesehatan pangan dan pertanian Kabupaten Mahakam Ulu. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2): 109-120. <http://ejurnal.untagsmd.ac.id/index.php/AP/search/authors/view?firstName=Hendrika&middleName=Junita&lastName=Huti&affiliation=&country=ID>
- Isnah, N. H. (2021). Kinerja Dinas Sosial Dalam Pemerataan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Kepada Masyarakat di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(2): 586-598. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/viewFile/7377/4777>
- Katharina, R. (2020). Relasi Pemerintah Pusat–Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19. *Info Singkat*, XII, 25. Retrieved from http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-5-II-P3DI-Maret-2020-221.pdf
- Kementerian Koordinator. (2018). Pedoman Khusus Pengelolaan Pengaduan Bantuan Sosial Pangan. Jakarta.
- Koesomowidjojo, S. (2017). Balance Scorecard Model Pengukuran Kinerja Organisasi Dengan Empat Perspektif. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Larasati, S. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Macella, A. D. R. (2020). Kinerja organisasi publik dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan di kantor Kecamatan Johan Pahlawan. *Journal Public Policy*, 6(1): 13-24.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Rosdakarya.
- Prasetya, A. (2020). Sistem Pengukuran Kinerja Aparat Pemerintah Menggunakan Metode ANP dan TOPSIS [Universitas Negeri Gorontalo]. <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/531415056/sistem-pengukurankinerja-aparat-pemerintah-menggunakan-metode-anp-dan-topsis.html#>
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Badan Pendidikan, Penelitian, Dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial Ri Tahun 2020
- Rahajeng, A. D. (2018). Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Publik dengan Pendekatan Value For Money (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman). Universitas Santa Dharma Yogyakarta. Tesis. Sanata Dharma University.
- Sari GAPLP. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). *Jurnal Sains & Kesehatan*, 2(4), 549-552. <https://jsk.farmasi.unmul.ac.id/index.php/jsk/article/view/230>
- Sinaga, O. S. (2020). Manajemen Kinerja dalam Organisasi. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Statistik, B. P. (2020). Penerima bantuan Sosial Tunai (BST). *Jurnal Badan Pusat Statistik*.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Suryani, N. K., J. E. H. J. F. (2018). Kinerja Organisasi. Yogyakarta: Deepublish
- Tim Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, 2017. Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai, Cet Ke-1 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Wira, S. (2022). Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kota Pematangsiantar. Diploma thesis, IPDN Jatinango. <http://eprints.ipdn.ac.id/6130/>